

PULAU REMPANG

AKD: PULAU REMPANG

Bulan: September 2023

Oleh:

GAMBAR

# **PERPUSTAKAAN DPR RI**

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: [perpustakaan@dpr.go.id](mailto:perpustakaan@dpr.go.id)

Web: [perpustakaan.dpr.go.id](http://perpustakaan.dpr.go.id)

Pulau Rempang memiliki luas wilayah 16.583 hektar. Pulau itu terdiri dari dua kelurahan, yakni Rempang Cate dan Sembulang. Keduanya masuk dalam wilayah Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada 7.512 jiwa yang tinggal di pulau Rempang. Tokoh warga Pulau Rempang, Gerisman Ahmad mengatakan, di Pulau Rempang terdapat 16 kampung tua atau permukiman warga asli. Warga asli tersebut terdiri dari suku Melayu, suku Orang Laut, dan suku Orang Darat yang diyakini telah bermukim di Pulau Rempang sejak tahun 1834.

Menurut Kemendikbud, Pulau Rempang termasuk juga Pulau Galang awalnya tidak masuk dalam Otorita Batam dan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Riau. Namun setelah dikeluarkannya Kepres No. 28 Tahun 1992, wilayah kerja Otorita Batam diperluas meliputi wilayah Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang dan pulau-pulau sekitarnya. Pulau Rempang terhubung dengan pulau-pulau lain seperti Pulau Batam, dan Galang melalui Jembatan Bareleng. Jembatan ini adalah jembatan yang saling sambung-menyambung dan dibangun untuk memperluas Otorita Batam sebagai regulator daerah industri Pulau Batam. Nama Bareleng adalah singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang. Jembatan menghubungkan sejumlah pulau di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru.

Sejak proyek strategis nasional (PSN) bergulir pada 2016, sudah ratusan proyek yang dikerjakan, bahkan lebih dari 100 proyek yang sudah selesai dan beroperasi. Tak sedikit halangan yang dihadapi dalam mewujudkan PSN. Salah satunya terkait pembebasan lahan yang melibatkan masyarakat setempat. Peristiwa kerusuhan di Pulau Rempang menjadi puncak buruknya komunikasi dan keberpihakan kepada hak masyarakat adat dalam merealisasikan PSN. Masyarakat Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, pada awal September ini menolak rencana relokasi atau pengosongan lahan 16 kampung adat Melayu yang ditawarkan pemerintah. Wilayah mereka akan dijadikan kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata yang terintegrasi.

Pengembangan kawasan yang diberi nama Kawasan Rempang Eco-City tersebut merupakan proyek pemerintah pusat melalui kerja sama antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG). Proyek dimaksudkan untuk mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia. Rempang Eco City (REC) yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) itu menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Keberadaannya membutuhkan ketersediaan tanah, termasuk yang dimiliki warga masyarakat kampung tua, dengan konsekuensi harus merelokasi 5.000-10.000 warga ke Pulau Galang.

**Sumber:**

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/10/130000065/profil-pulau-rempang-kepulauan-riau-yang-seluruh-warganya-akan-digusur?page=all>

[https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/12/pulau-rempang-diharapkan-jadi-motor-baru-pertumbuhan-ekonomi?open\\_from=Search\\_Result](https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/12/pulau-rempang-diharapkan-jadi-motor-baru-pertumbuhan-ekonomi?open_from=Search_Result)

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Andre Rosiade ke Menteri Bahliil: Segera Selesaikan Masalah Investasi di Pulau Rempang!	<a href="https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46481/t/Andre%20Rosia%20nde%20ke%20Menteri%20Bahliil:%20Segera%20Selesaikan%20Masalah%20Investasi%20di%20Pulau%20Rempang!">https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46481/t/Andre%20Rosia%20nde%20ke%20Menteri%20Bahliil:%20Segera%20Selesaikan%20Masalah%20Investasi%20di%20Pulau%20Rempang!</a>
Berita	Bentrok di Pulau Rempang, Luluk Ingatkan Proyek Investasi Jangan Rugikan Rakyat	<a href="https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46663/t/Bentrok%20di%20Pulau%20Rempang,%20Luluk%20Ingatkan%20Proyek%20Investasi%20Jangan%20Rugikan%20Rakyat">https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46663/t/Bentrok%20di%20Pulau%20Rempang,%20Luluk%20Ingatkan%20Proyek%20Investasi%20Jangan%20Rugikan%20Rakyat</a>
Berita	Kehadiran Negara dalam Konflik Rempang	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18041">https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18041</a>
Berita	Kepolisian Harusnya Melindungi Bukan Mengancam Masyarakat Adat	<a href="https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46395/t/Kepolisian%20Harusnya%20Melindungi%20Bukan%20Mengancam%20Masyarakat%20Adat">https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46395/t/Kepolisian%20Harusnya%20Melindungi%20Bukan%20Mengancam%20Masyarakat%20Adat</a>
Berita	Komisi III akan Dalami Tindakan Represif Aparat Gabungan kepada Warga di Pulau Rempang	<a href="https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46425/t/%20Komisi%20II%20akan%20Dalami%20Tindakan%20Represif%20Aparat%20Gabungan%20kepada%20Warga%20di%20Pulau%20Rempang">https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46425/t/%20Komisi%20II%20akan%20Dalami%20Tindakan%20Represif%20Aparat%20Gabungan%20kepada%20Warga%20di%20Pulau%20Rempang</a>
Berita	Komisi III Akan Panggil Pengusaha dan Investor di Pulau Rempang	<a href="https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46598/t/Komisi%20III%20Akan%20Panggil%20Pengusaha%20dan%20Investor%20di%20Pulau%20Rempang">https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46598/t/Komisi%20III%20Akan%20Panggil%20Pengusaha%20dan%20Investor%20di%20Pulau%20Rempang</a>
Berita	Konflik di Pulau Rempang, Pemerintah Diminta Utamakan Pendekatan Humanis	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18044">https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18044</a>
Berita	Konflik Pulau Rempang dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18051">https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18051</a>
Berita	Luluk Nur Hamidah: Saya Dukung Komnas HAM Usut Penembakan Gas Air Mata di Rempang	<a href="https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46664/t/Luluk%20Nur%20Hamidah:%20Saya%20Dukung%20Komnas%20HAM%20Usut%20Penembakan%20Gas%20Air%20Mata%20di%20Rempang">https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46664/t/Luluk%20Nur%20Hamidah:%20Saya%20Dukung%20Komnas%20HAM%20Usut%20Penembakan%20Gas%20Air%20Mata%20di%20Rempang</a>
Berita	Memahami Kasus Pulau Rempang	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18042">https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18042</a>
Berita	Mengurai Konflik Rempang	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18040">https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18040</a>
Berita	Pendekatan Humanis di Rempang	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18043">https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18043</a>
Berita	Perjuangkan Hak Warga Rempang, Perwakilan Warga Temui Komnas HAM	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18047">https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18047</a>
Berita	Presiden Jokowi: Masalah di Rempang Imbas Komunikasi yang Kurang Baik	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18046">https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18046</a>
Berita	Pulau Rempang dan Ragam Respons dari Poros Koalisi Parpol	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18049">https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18049</a>
Berita	Pulau Rempang Diharapkan Jadi Motor Baru Pertumbuhan Ekonomi	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18050">https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18050</a>
Berita	Pulau Rempang Miliki Akar Sejarah yang Harus Dihormati dan Diperhatikan dalam Pembangunan	<a href="https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46669/t/Pulau%20Rempang%20Miliki%20Akar%20Sejarah%20yang%20Harus%20Dihormati%20dan%20Diperhatikan%20dalam%20Pembangunan">https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46669/t/Pulau%20Rempang%20Miliki%20Akar%20Sejarah%20yang%20Harus%20Dihormati%20dan%20Diperhatikan%20dalam%20Pembangunan</a>
Berita	Rempang, Proyek Strategis Nasional, dan Luka Sosial	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18048">https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18048</a>

Berita	Subardi Minta Kepala BP Batam Terbuka Jelaskan Persoalan di Pulau Rempang	<a href="https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46565/t/Subardi%20Min%20Kepala%20BP%20Batam%20Terbuka%20Jelaskan%20Persoalan%20di%20Pulau%20Rempang">https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46565/t/Subardi%20Min%20Kepala%20BP%20Batam%20Terbuka%20Jelaskan%20Persoalan%20di%20Pulau%20Rempang</a>
Berita	Tahap Pertama, Empat Kampung di Rempang Akan Direlokasi	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18045">https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/18045</a>
Jurnal	Adat Law in Indonesia	<a href="http://jstor.org">jstor.org</a>
Jurnal	Does Institutional Activism Strengthen Democracy? A Case Study of Agrarian and Anti-Corruption Movements in Indonesia	<a href="http://jstor.org">jstor.org</a>
Jurnal	Implementasi Undang-Undang Minerba terhadap Perizinan Pembangunan Proyek Strategis Nasional	<a href="https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/507/473">https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/507/473</a>
Jurnal	INDONESIA'S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT UNDER THE JOKOWI ADMINISTRATION	<a href="http://jstor.org">jstor.org</a>
Jurnal	Infrastructure Development under the Jokowi Administration: Progress, Challenges and Policies	<a href="http://jstor.org">jstor.org</a>
Jurnal	Kedudukan Hukum Tukar Menukar Tanah Aset Desa Bagi Kepentingan Strategis Nasional	<a href="https://mail.online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/23237/15205">https://mail.online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/23237/15205</a>
Jurnal	Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional Terkait Ganti Kerugian Bagi Masyarakat Yang Terdampak	<a href="https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/1525/1423">https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/1525/1423</a>
Jurnal	Pengembangan Potensi Kearifan Lokal Yang Mendukung Pariwisata Di Kampung Tua Patam Lestari Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam	<a href="http://ejournal.univbatam.ac.id/index.php/Potensi/article/view/1214">http://ejournal.univbatam.ac.id/index.php/Potensi/article/view/1214</a>
Jurnal	Penyuluhan Arti Penting Perlindungan Hak-Hak Konstitusional pada Masyarakat Pesisir	<a href="https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/article/view/74504/2973">https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/article/view/74504/2973</a>
Jurnal	Peran Infrastruktur Dalam Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional	<a href="https://berkas.dpr.go.id/pusli/files/policy_brief/Policy%20Brief-28-1-M-2023.pdf">https://berkas.dpr.go.id/pusli/files/policy_brief/Policy%20Brief-28-1-M-2023.pdf</a>
Jurnal	Peranan Profesi Penilai Publik Terhadap Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Sesuai Dengan Perpres No.3 Tahun 2016	<a href="https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/63509">https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/63509</a>
Jurnal	Percepatan Proyek Strategis Nasional	<a href="https://berkas.dpr.go.id/pusli/files/info_singkat/Info%20Siangkat---16-II-P3DI-Agustus-2022-1957.pdf">https://berkas.dpr.go.id/pusli/files/info_singkat/Info%20Siangkat---16-II-P3DI-Agustus-2022-1957.pdf</a>
Jurnal	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2023 Dan Strategi Kebijakan	<a href="https://berkas.dpr.go.id/pusli/files/info_singkat/Info%20Siangkat-XV-8-II-P3DI-April-2023-224.pdf">https://berkas.dpr.go.id/pusli/files/info_singkat/Info%20Siangkat-XV-8-II-P3DI-April-2023-224.pdf</a>
Jurnal	Resolving Land Conflicts in Indonesia	<a href="http://jstor.org">jstor.org</a>
Jurnal	The State, the People, and Their Mediators: The Struggle over Agrarian Law Reform in Post-New Order Indonesia	<a href="http://jstore.org">jstore.org</a>
Jurnal	The Supreme Court and Adat Inheritance Law in Indonesia	<a href="http://jstore.org">jstore.org</a>
Jurnal	Using International Institutions to Improve Public Procurement	<a href="http://jstor.org">jstor.org</a>
Buku	Hukum Adat Indonesia	<a href="https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&amp;id=14147&amp;keywords=hukum%20adat">https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&amp;id=14147&amp;keywords=hukum%20adat</a>
Buku	Hukum agraria dan masyarakat di Indonesia	<a href="https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&amp;id=241125&amp;keywords=hukum%20agraria">https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&amp;id=241125&amp;keywords=hukum%20agraria</a>
Buku	Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah	<a href="https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&amp;id=190959&amp;keywords=hukum%20agraria">https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&amp;id=190959&amp;keywords=hukum%20agraria</a>

Buku	Hukum agraria sengketa pertanahan: Penyelesaiannya melalui arbitrase dalam teori dan praktik	<a href="https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&amp;id=31353&amp;keywords=hukum%20agraria">https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&amp;id=31353&amp;keywords=hukum%20agraria</a>
Buku	Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional	<a href="https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&amp;id=20215&amp;keywords=hukum%20adat">https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&amp;id=20215&amp;keywords=hukum%20adat</a>
Buku	Lubuk dan Kearifan Lokal Masyarakat Adat	<a href="https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&amp;id=30423&amp;keywords=masyarakat%20adat">https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&amp;id=30423&amp;keywords=masyarakat%20adat</a>
Buku	Membangun Indonesia: negara kebangsaan dan masyarakat hukum adat	<a href="https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&amp;id=26016&amp;keywords=hukum%20adat">https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&amp;id=26016&amp;keywords=hukum%20adat</a>
Buku	Negara dan Masyarakat Hukum Adat	<a href="https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&amp;id=31330&amp;keywords=hukum%20adat">https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&amp;id=31330&amp;keywords=hukum%20adat</a>
Buku	Pedoman Lengkap Ganti Untung Pengadaan Tanah: Memetakan Solusi Strategis Pengembangan Infrastruktur di Indonesia	<a href="https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&amp;id=31284&amp;keywords=hukum%20agraria">https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&amp;id=31284&amp;keywords=hukum%20agraria</a>
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional	<a href="https://peraturan.go.id/id/permenko-perekonomian-no-21-tahun-2022">https://peraturan.go.id/id/permenko-perekonomian-no-21-tahun-2022</a>
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional	<a href="https://peraturan.bpk.go.id/Detail/198374/permenko-perekonomian-no-7-tahun-2021">https://peraturan.bpk.go.id/Detail/198374/permenko-perekonomian-no-7-tahun-2021</a>
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional	<a href="https://peraturan.bpk.go.id/Detail/219198/permenko-perekonomian-no-9-tahun-2022">https://peraturan.bpk.go.id/Detail/219198/permenko-perekonomian-no-9-tahun-2022</a>
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	<a href="https://peraturan.bpk.go.id/Detail/152706/perpres-no-109-tahun-2020">https://peraturan.bpk.go.id/Detail/152706/perpres-no-109-tahun-2020</a>
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	<a href="https://peraturan.bpk.go.id/Detail/38201/perpres-no-3-tahun-2016">https://peraturan.bpk.go.id/Detail/38201/perpres-no-3-tahun-2016</a>
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	<a href="https://peraturan.bpk.go.id/Detail/88217/perpres-no-56-tahun-2018">https://peraturan.bpk.go.id/Detail/88217/perpres-no-56-tahun-2018</a>
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	<a href="https://peraturan.bpk.go.id/Detail/72972/perpres-no-58-tahun-2017">https://peraturan.bpk.go.id/Detail/72972/perpres-no-58-tahun-2017</a>
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	<a href="https://peraturan.bpk.go.id/Detail/41567/perpres-no-75-tahun-2014">https://peraturan.bpk.go.id/Detail/41567/perpres-no-75-tahun-2014</a>
Undang-undang & Peraturan	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	<a href="https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20200226-051940-2495.pdf">https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20200226-051940-2495.pdf</a>
Surat kabar	Kasus Pulau Rempang Komisi III Segera Panggil Investor	<a href="https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/45342">https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/45342</a>